

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

1. Tingkat kemandirian keuangan daerah Kabupaten Pakpak Bharat sebelum dan pada saat pandemi COVID-19 mengalami perbedaan yang signifikan. Meskipun demikian, secara keseluruhan tingkat kemandirian keuangan daerah Kabupaten Pakpak Bharat baik sebelum dan pada saat pandemi COVID-19 masih tergolong rendah dengan pola hubungan instruktif. Pola hubungan instruktif mengacu pada situasi di mana suatu entitas atau lembaga memiliki ketergantungan yang signifikan pada sumber daya atau bantuan dari pihak lain, dan pihak lain tersebut memiliki kontrol atau kekuasaan yang lebih besar dalam mengambil keputusan atau memberikan instruksi. Dalam pola ini, pemerintah daerah tidak memiliki kebebasan penuh dalam mengelola keuangan mereka sendiri, tetapi harus mengikuti instruksi atau aturan yang ditetapkan oleh pihak lain. Hal ini dapat membatasi kemampuan pemerintah daerah untuk mengambil keputusan yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerah mereka, serta dapat mempengaruhi tingkat kemandirian keuangan daerah.
2. Tingkat ketergantungan keuangan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat sebelum dan pada saat pandemi COVID-19 berada pada kategori sangat tinggi. Hal ini terlihat dari rata-rata persentase rasio ketergantungan keuangan daerah Kabupaten Pakpak Bharat dari tahun 2018 hingga 2021. Kesimpulan ini menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Pakpak

Bharat masih sangat bergantung pada dana baik dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi Sumatra Utara dalam membiayai semua urusan otonomi daerah.

3. Tingkat desentralisasi fiskal keuangan Kabupaten Pakpak Bharat tidak mengalami perbedaan yang signifikan sebelum dan pada saat pandemi COVID-19. Selain itu, kinerja keuangan Kabupaten Pakpak Bharat juga berada pada kategori sangat kurang. Desentralisasi fiskal merujuk pada proses atau kebijakan pemerintah yang mentransfer kewenangan dan tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan publik dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah atau lokal. Dalam konteks desentralisasi fiskal, pemerintah daerah diberikan otonomi dalam mengelola sumber daya keuangan mereka sendiri, termasuk pendapatan dan pengeluaran. Tingkat desentralisasi fiskal mengacu pada sejauh mana keputusan dan kewenangan dalam pengelolaan keuangan daerah diberikan kepada pemerintah daerah, dalam hal ini Kabupaten Pakpak Bharat. Jika tingkat desentralisasi fiskal tidak mengalami perubahan yang signifikan sebelum dan selama pandemi COVID-19, maka hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah kabupaten tetap mempertahankan tingkat otonomi dalam mengelola keuangan daerah.

## **5.2 Saran**

1. Bagi Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat ada beberapa saran yang perlu dipertimbangkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah seperti Diversifikasi Sumber Pendapatan: Selain mengandalkan pendapatan dari

sektor tertentu, daerah dapat mencari peluang dalam sektor lain yang memiliki potensi pertumbuhan. Contohnya, pengembangan sektor pariwisata, industri kreatif, pertanian, atau manufaktur lokal dan Peningkatan Efisiensi Pengelolaan Keuangan: Memperbaiki manajemen keuangan daerah dapat mengoptimalkan pendapatan yang sudah ada. Hal ini meliputi pengurangan pemborosan, peningkatan pendapatan dari aset daerah, serta pengendalian pengeluaran yang lebih baik.

2. Bagi penulis, pembaca, dan peneliti selanjutnya diharapkan agar penelitian ini dapat dijadikan referensi dan menambah ilmu dan teori berupa kajian Pustaka maupun hasil penelitian yang diperoleh bagi peneliti lain serta dapat menggunakan lebih banyak rasio lagi sehingga hasil penelitiannya lebih akurat lagi. Selain itu diharapkan lebih rinci lagi dalam menganalisa kinerja keuangan Pemerintah Daerah.